

GRAND STRATEGY POROS MARITIM DUNIA BERHADAPAN DENGAN BELT AND ROAD INITIATIVE DALAM KONTEKS DIPLOMASI PERTAHANAN

GRAND STRATEGY OF GLOBAL MARITIME FULCRUM TOWARDS BELT AND ROAD INITIATIVE IN THE CONTEXT OF DEFENSE DIPLOMACY

Meitty Josephin Balontia¹, H.M. Halkis², A. Setyo Wibowo³

Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan
(josephinmei@gmail.com)

Abstrak -- Dalam menghadapi berbagai tantangan, Indonesia perlu meningkatkan kekuatannya. Poros Maritim Dunia sebagai sebuah *grand strategy* melingkupi seluruh kekuatan nasional baik pertahanan, ekonomi, maupun diplomasi. Dalam konsep kekuatan / power, setidaknya ada tiga jenis power yang dipakai oleh sebuah negara yakni, militer (*hard power*), kekuatan ekonomi, dan *soft power*. Ketiganya penting dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk didalamnya tantangan yang datang melalui hadirnya *Belt and Road Initiative*. *Belt and Road Initiative* sebagai inisiatif konektivitas antar negara terbesar jelas membawa tantangan tetapi juga peluang bagi Indonesia. Indonesia dengan upaya nya untuk membangun konektivitas maritim dan wilayah perairan dapat memanfaatkan kehadiran *Belt and Road Initiative* terutama dalam hal pembiayaan dan teknologi. Akan tetapi, usaha untuk menangkap peluang tersebut harus diimbangi dengan kemampuan untuk meminimalisir tantangan yang mungkin muncul. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana Poros Maritim Dunia sebagai sebuah *grand strategy* mampu menjawab tantangan serta peluang yang datang dari *Belt and Road Initiative*. Serta, bagaimana diplomasi pertahanan sebagai bagian dari *soft power* Indonesia mampu mengupayakan antisipasi terhadap penggunaan *hard power* Tiongkok sekaligus mengangkat peluang yang bisa didapatkan dari kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam bingkai *Belt and Road Initiative*. Dengan menggunakan penelitian kualitatif fenomenologis, peneliti mencoba mencari makna dan pola kekuatan yang terdapat baik dalam Poros Maritim Dunia, *Belt and Road Initiative*, maupun dalam relasi keduanya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa *grand strategy* Poros Maritim Dunia efektif dalam menghadapi *Belt and Road Initiative* dengan meningkatkan serta menggunakan kekuatan yang ada termasuk diplomasi pertahanan.

Kata Kunci: *grand strategy, poros maritim dunia, belt and road initiative, power, hard power, soft power, peluang, tantangan*

Abstract -- To overcome various challenges, Indonesia needs to increase its powers. The Global Maritime Fulcrum as a grand strategy covers all national powers, including defense, economy and diplomacy. In the concept of power, there are three types of powers that being used by the state which is, military (*hard power*), economic power, and *soft power*. All of them are important to face various challenges including challenges that come through the presence of Belts and Road Initiatives. The Belt and Road initiative as a largest inter connectivity across nations clearly present not only challenges but also opportunities for Indonesia. Indonesia's effort to build and improve its maritime connectivity can take advantage of Belt and Road Initiative in terms of funding and technology. However, Indonesia's effort to get these opportunities

¹ Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

² Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

³ Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia.

must be balanced with the ability to minimize the challenges that might arise. This research shows how the Global Maritime Fulcrum as a grand strategy can answer both challenges and opportunities of Belt and Road Initiative. And how defense diplomacy as part of Indonesia's soft power is able to anticipate the using of China's hard power while raising opportunities that can be obtained from cooperation between Indonesia and China in the frame of the Belt and Road Initiative. By using phenomenological qualitative research, researcher try to find the meaning and pattern of power in the Global Maritime Fulcrum, Belt and Road Initiative, and in their relation. In this study it was found that the Global Maritime Fulcrum Grand Strategy was effective in dealing with the Belt and Road Initiative by increasing and using its powers including defense diplomacy.

Keywords: grand strategy, global maritime fulcrum, belt and road initiatives, power, hard power, soft power, opportunities, challenges

Pendahuluan

Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan visi Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo. Dengan hadirnya PMD maka wilayah maritim Indonesia menjadi fokus sekaligus pijakan bagi pembangunan nasional Indonesia ke depan. Berbagai peraturan dan realisasinya pun mulai bermunculan untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa maritim yang kuat sebagaimana yang menjadi cita-cita PMD. Ketika berbicara mengenai sebuah visi, kita berbicara mengenai suatu tujuan. Jika dikaitkan dengan PMD, maka secara sekilas kita bisa melihat bahwa PMD merupakan sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia.

Namun dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa PMD bukan hanya dapat dipandang sebagai sebuah tujuan tetapi lebih dalam lagi, sebagai sebuah *grand strategy* dalam menghadapi berbagai tantangan baik

dalam maupun luar negeri. Pemahaman mengenai PMD sebagai *grand strategy* bisa dipertanggungjawaban dengan berdasar pada karakteristik yang ada di dalam PMD itu sendiri.

Sebuah strategi dapat dipandang sebagai *grand strategy* jika memiliki beberapa karakteristik antara lain: 1) Diperuntukkan untuk tujuan jangka panjang, 2) Terkait erat dengan prioritas tertinggi negara bersangkutan, dan 3) Melingkupi keseluruhan dari kenegaraan seperti militer, diplomasi dan ekonomi⁴. Nina Silove dalam *Beyond the Buzzword: The Three Meanings of Grand Strategy* mengatakan bahwa ketiga karakteristik tersebut belum cukup menggambarkan definisi *grand strategy* itu sendiri. Untuk itu, ia kemudian mengutip beberapa pengertian mengenai *grand strategy* termasuk di dalamnya, pandangan Williamson Muray yang menyatakan: “lebih dari segalanya, *grand strategy* menuntut

⁴ Silove Nina, *Beyond the Buzzword: The Three Meanings of “Grand Strategy”*, *Security Studies Vol. 27* (USA: Routledge Taylor and Francis Group 2018), hlm. 27.

adanya keterkaitan antara realitas politik, sosial dan ekonomi dengan kekuatan militer seperti juga, kesadaran bahwa politik harus, dalam semua kasus, mendorong kebutuhan militer. *Grand strategy* juga harus berlandaskan pada penilaian realistis dan pemahaman akan diri sendiri maupun pihak lawan”⁵. Bagi Nina Silove, pernyataan Muray mengisyaratkan adanya tiga unsur lainnya yang menandai sebuah *grand strategy* yakni, keterkaitan, kesadaran, dan pemahaman.

Berdasarkan tiga karakteristik serta tiga unsur yang harus dimiliki oleh *grand strategy* di atas, maka PMD dapat dipahami sebagai *grand strategy* dengan empat alasan. *Pertama*, PMD merupakan tujuan jangka panjang dari Indonesia dimana ke depannya, Indonesia dapat menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian dunia, sesuai dengan kepentingan nasionalnya⁶. Tujuan ini tercatat dalam Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia Bagian Pertama.

Kedua, PMD dalam realisasinya digunakan untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan prioritas negara agar tujuan nasional dari

negara bersangkutan dapat terwujud. Dalam hal ini, PMD menjadi sebuah instrumen untuk memastikan kebutuhan prioritas Indonesia dapat tercapai. Salah satunya adalah peningkatan infrastruktur guna pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga, PMD melingkupi keseluruhan aspek pemerintahan termasuk di dalamnya ekonomi, diplomasi dan militer. Hal tersebut dapat dilihat melalui Lima Pilar PMD yang melibatkan ekonomi maritim, diplomasi maritim serta pertahanan maritim di dalamnya.

Keempat, adanya keterkaitan antara kekuatan militer dengan kekuatan ekonomi, politik serta sosial dalam PMD. Keterkaitan ini menumbuhkan sebuah kesadaran akan pentingnya kekuatan militer yang terwujud dalam usaha peningkatan pertahanan maritim sesuai dengan Pilar Kelima PMD. I.G.B Dharma Agastia dalam penelitiannya *3 Years Later, Where is Indonesia's Global Maritime Fulcrum* mengatakan bahwa PMD sejak awal memiliki dua dimensi di dalamnya yakni, dimensi strategis dan ekonomis⁷. Dimensi strategis lekat dengan visi Indonesia untuk menjadikan TNI AL (militer) sebagai kekuatan maritim regional. Sementara

⁵ *Ibid.*, hlm.33.

⁶Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia Lampiran I, Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia, hlm.4.

⁷Dharma I.G.B. Agastia, “3 Years Later, Where is Indonesia's Global Maritime Fulcrum”, dalam <https://thedi diplomat.com/2017/11/3-years-later-where-is-indonesias-global-maritime-fulcrum/>, diakses pada 25 Januari 2019.

dimensi ekonomi terwujud dalam pembangunan konektivitas antar wilayah dengan harapan, pembangunan infrastruktur dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, PMD tidak hanya merupakan persoalan ekonomi tapi menyangkut pula aspek pertahanan di dalamnya. Hal tersebut menjadikan PMD sebagai suatu kerangka besar yang dijadikan instrumen dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia.

Sebagai sebuah kerangka besar, PMD melingkupi berbagai aspek kekuatan nasional di dalamnya, baik ekonomi, militer, sosial, politik dan lain sebagainya. Menurut Drew dan Snow, *grand strategy* melingkupi keseluruhan kekuatan nasional. Itu sebabnya, PMD dapat pula diterjemahkan sebagai *grand strategy* Indonesia.

Dengan melihat PMD sebagai sebuah *grand strategy* maka kita tidak bisa melepaskannya dari berbagai tantangan yang diharapkan mampu untuk teratasi oleh PMD. Tantangan yang dimaksud melingkupi baik dalam maupun luar negeri. Tantangan dalam negeri seperti ketidak-merataan harga di berbagai wilayah Indonesia merupakan salah satu contoh tantangan yang sedang diantisipasi. Dengan dibangunnya infrastruktur maritim seperti tol laut, pemerintah berhadapan dapat menghadirkan pemerataan harga di setiap wilayah

Indonesia hingga berujung pada pemerataan kesejahteraan.

Adapun tantangan luar negeri yang dihadapi oleh Indonesia, yang perlu diantisipasi antara lain, maraknya *illegal fishing* yang dilakukan kapal asing di wilayah perairan, adanya konflik Laut Cina Selatan, hingga adanya pertarungan dua kekuatan besar dunia di wilayah kawasan yakni, Tiongkok dan Amerika Serikat. Kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok perlu menjadi pertimbangan bagi negara-negara termasuk Indonesia, dalam mengambil langkah strategisnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana efektivitas PMD sebagai sebuah *grand strategy* dalam menghadapi tantangan yang datang dari pihak Tiongkok khususnya, dalam konteks *Belt and Road Initiative* (BRI).

Pemilihan BRI sebagai isu yang akan diangkat dalam penelitian ini tidak terlepas dari beberapa alasan yakni;

- 1) PMD adalah strategi yang lahir dari hasil analisa mendalam mengenai berbagai persoalan baik dari dalam maupun luar negeri dengan memadukan unsur-unsur kekuatan nasional yang ada. Salah satu tantangan yang datang dari luar negeri adalah hadirnya proyek BRI.
- 2) BRI merupakan pembangunan jalur perdagangan baik darat maupun laut.

Indonesia sendiri merupakan negara yang berada di perlintasan jalur lautnya.

- 3) Tiongkok merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar saat ini, melalui BRI negara tersebut bersedia untuk memberikan dukungan finansial dan teknologi bagi pembangunan infrastruktur negara anggota BRI. Hal tersebut merupakan peluang besar bagi Indonesia yang memang sedang berfokus pada pembangunan infrastrukturnya.
- 4) BRI berfokus pada pembangunan infrastruktur setiap negara anggota dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan perekonomian masing-masing negara. Jadi, BRI pertama-tama bukan terkait isu ideologi dan politik melainkan ekonomi.

Dengan pertimbangan di atas, peneliti merasa bahwa secara ideal, kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam wadah BRI memang perlu dilaksanakan. Akan tetapi berbagai pandangan mengenai tantangan yang mungkin saja datang dari Tiongkok, negara pencetus BRI, melahirkan suatu asumsi baru yakni, bahwa BRI perlu dipandang sebagai tantangan dan bukan peluang. Hal tersebut berkenaan dengan besarnya hutang negara-negara anggota BRI pada Tiongkok dalam pembiayaan proyek infrastruktur mereka. Beberapa negara

sudah mulai mempertimbangkan resiko ketidak mampuan negara membayar hutang pembangunan infrastrukturnya.

Selain tantangan dalam lingkup ekonomi, aspek politik dan pertahanan di wilayah kawasan pun perlu menjadi pertimbangan. BRI dianggap sebagai strategi Tiongkok untuk mendominasi negara-negara terlibat. Peter Cai dalam *Understanding Belt and Road Initiative* mengatakan bahwa pernyataan Presiden Xi Jinping terkait BRI dalam Konferensi Diplomasi *Peripheral* 2013, menunjukkan pertimbangan Tiongkok untuk menggunakan kemampuan ekonomi dalam usahanya mempertahankan stabilitas regional serta meningkatkan kepemimpinan Tiongkok di antara negara-negara tetangga⁸. Banyak kalangan yang memang melihat bahwa BRI merupakan strategi geo-politik Tiongkok dalam meningkatkan pengaruh dan kekuatan di lingkungan internasional, serta menangkal berbagai ancaman yang datang dari luar. Dalam pandangan Justin Yifu Lin misalnya, OBOR atau BRI dihadirkan untuk menangkal kebijakan Amerika Serikat seperti *Pivot to Asia* dan *Trans-Pasific Partnership (TPP)* melalui penggunaan kemampuan ekonomi serta pengalaman Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur. Penggunaan kemampuan tersebut

⁸ Peter Cai, *Understanding Belt and Road Initiative*, (USA, Iowa Institute), hlm. 3.

diharapkan dapat memperkuat posisi Tiongkok di wilayah Kawasan⁹.

Semua pandangan di atas perlu diperhatikan oleh negara-negara anggota BRI sebagai sebuah pertimbangan dalam menentukan arah kerjasama dengan pihak Tiongkok, khususnya dalam keikutsertaan mereka pada proyek BRI. Hal yang sama pun berlaku bagi Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan menunjukkan bahwa meskipun berhadapan dengan tantangan-tantangan di atas, BRI bisa menjadi peluang bagi Indonesia sejauh Indonesia betul-betul memahami cara kerja *power* atau kekuatan, baik yang bekerja dalam tubuh PMD, maupun cara kerja *power* yang terjalin diantara kedua strategi (PMD-BRI). Dengan mengetahui proses interaksi *power* yang terjadi diantara kedua strategi tersebut, kita bisa melihat apa yang perlu dipertahankan, ditingkatkan, ataupun diantisipasi agar relasi keduanya membawa peluang. Singkat kata, melalui Analisa *power*, peneliti akan mencoba mengangkat peluang dan meminimalisir tantangan yang datang dari kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Adapun alat yang digunakan untuk mengangkat peluang tersebut adalah diplomasi pertahanan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diasumsikan bahwa sebagai sebuah *grand strategy* (kumpulan kekuatan nasional) PMD harus mampu mengatasi tantangan yang ada termasuk didalamnya kehadiran BRI. Kemampuan PMD dalam mengantisipasi tantangan tersebut akan menunjukkan sejauh mana efektivitas PMD sebagai sebuah *grand strategy*. Adapun diplomasi pertahanan sebagai bagian dari kekuatan nasional akan digunakan untuk merealisasikan antisipasi PMD terhadap tantangan BRI.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain fenomenologis. Dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Prof. Dr. Lexy J. Moleong menyebutkan bahwa metodologi kualitatif dapat dipahami sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati¹⁰. Dari pengertian metodologi kualitatif tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemakaian metodologi yang sama dalam penelitian tesis ini merujuk pada pengamatan terhadap sumber-sumber data alamiah atau

⁹ *Ibid.*, hlm.5.

¹⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.4

sebagaimana adanya, yang ditemukan oleh peneliti selama proses pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, sumber-sumber data alamiah akan dicari berdasarkan kriteria-kriteria khusus dan diolah sehingga menemukan suatu kesimpulan yang mendekati kebenaran. Berkaitan dengan pengolahan dan analisa terhadap sumber-sumber data alamiah, peneliti akan menggunakan pendekatan fenomenologi.

John W. Creswell mengatakan bahwa pendekatan fenomenologi erat kaitannya dengan penyelidikan mengenai esensi dari pengalaman akan fenomena tertentu sebagaimana dialami oleh partisipan¹¹. Adapun prosedurnya melingkupi pembelajaran mengenai beberapa persoalan kemudian melalui proses pengaitan yang panjang akan terbangun suatu pola dan relasi makna¹².

Terkait penelitian ini, peneliti akan berusaha mencari esensi dari setiap pengalaman (sumber data) yang berhubungan dengan realisasi PMD serta BRI. Sumber data yang digunakan meliputi hasil wawancara, hasil seminar, hingga berbagai analisa dari para pakar dan pelaku baik berkenaan dengan PMD, BRI, maupun relasi keduanya yang tertuang dalam berbagai karya.

Adapun objek dari penelitian ini adalah penggunaan diplomasi pertahanan sebagai bagian dari *power* untuk mengangkat peluang dan meminimalisir tantangan yang muncul dalam relasi BRI dan *grand strategy* PMD.

Pembahasan

Kebijakan Pertahanan dalam Kerangka PMD

Kebijakan Pertahanan Indonesia sendiri secara umum dapat dilihat dalam Buku Putih (*White Paper*) yang secara rutin dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia setiap lima tahun. Buku Putih berisi kebijakan pertahanan menyeluruh yang disebar luaskan kepada masyarakat baik domestik maupun internasional dalam rangka menumbuhkan rasa percaya dan mengikis adanya potensi konflik.

Kebijakan Pertahanan berangkat dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Dalam Buku Putih Pertahanan, faktor-faktor ini terealisasikan dalam berbagai bentuk ancaman serta kondisi lingkungan strategis yang berkembang. Ancaman yang mempengaruhi keputusan serta arah kebijakan Pertahanan terbagi ke dalam tiga bentuk yakni, ancaman militer, non militer dan hibrida, yang dapat pula dikategorikan ke dalam ancaman nyata dan belum nyata.

¹¹ John W. Creswell. *Research Design*, 3rd Edition, (California: SAGE Publication 2009), hlm.13

¹² *Ibid.*,

Untuk mengatasi jenis atau bentuk ancaman di atas, Indonesia perlu membentuk pertahanan yang bersifat semesta. Bersifat semesta artinya usaha mempertahankan negara tidak hanya melibatkan militer tetapi juga seluruh kementerian/lembaga serta seluruh sumber daya termasuk di dalamnya, masyarakat Indonesia itu sendiri.

Dalam mewujudkan PMD pun, Indonesia perlu membentuk pertahanan yang tangguh dengan memperhatikan jenis ancaman serta cara mengantisipasi ancaman tersebut. Dalam mengantisipasi ancaman, Indonesia perlu terlebih dahulu mengidentifikasi apa ancaman yang dapat terjadi. Dalam hal ini, apa ancaman yang dapat memperlambat bahkan menggagalkan rencana realisasi penuh PMD.

Berbicara mengenai ancaman untuk merealisasikan PMD, maka kita pertamanya berbicara mengenai ancaman yang mengintai wilayah Maritim Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Maritim dalam Mendukung PMD telah disebutkan ancaman-ancaman yang perlu diantisipasi. Ancaman-ancaman tersebut dibagi ke dalam dua jenis yakni, ancaman yang datang dari luar dan dalam.

Adapun ancaman yang dimaksud adalah segala bentuk aktivitas serta kejadian yang dapat menghalangi perwujudan

kepentingan Pertahanan dan keamanan dalam PMD. Kepentingan Pertahanan dan Keamanan dalam kerangka PMD terdiri dari:

1. Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah maritim;
2. Mendukung pengamanan atas_eksistensi, pemanfaatan, perusahaan, serta pelestarian sumber daya kelautan;
3. Membangun pertahanan yang mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
4. Menjalankan diplomasi pertahanan pada domain maritim;
5. Membangun kesadaran bela negara melalui penguatan budaya maritim;
6. Mewujudkan postur pertahanan maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.

Kepentingan Pertahanan dan keamanan di atas perlu diwujudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kekuatan pertahanan maritim di dunia sehingga dapat mengamankan baik pembangunan dalam negeri maupun keamanan wilayah regional (internasional). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan No.9 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa PMD memunculkan konsekuensi kebutuhan sistem pertahanan yang tidak hanya sekedar memiliki kemampuan melindungi wilayah territorial dan ZEE saja, namun juga harus memiliki

kemampuan menjangkau wilayah operasi yang lebih luas serta jauh melampaui wilayah territorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah operasi yang dimaksud adalah seluruh wilayah Kawasan maritim regional hingga global. Dalam upaya melindungi wilayah territorial dan ZEE Indonesia, TNI AL sebagai komponen utama pengamanan wilayah perairan pun mengadakan penambahan Komando Armada menjadi tiga yang berlokasi di Sorong, Papua. Penambahan kekuatan militer di wilayah TNI sebenarnya tidak hanya terbatas pada penambahan Komando Armada di Sorong tetapi juga penambahan tiga satuan TNI lainnya yakni, Divisi Infanteri 3/Kostrad di Makassar, Koopsau III di Biak, dan Pasmars-3 Korps Marinir di Sorong¹³.

Adanya berbagai perkembangan tantangan yang dihadapi serta kepentingan untuk mengamankan keseluruhan wilayah kedaulatan NKRI dari Barat hingga Timur dalam konteks merealisasikan PMD, membuat TNI perlu mengembangkan organisasi khususnya ke arah wilayah Timur¹⁴.

Selain pengamanan seluruh wilayah kedaulatan NKRI di atas, dalam PMD,

kekuatan militer Indonesia di wilayah perairan harus juga dibangun untuk dapat menjangkau wilayah yang lebih luas lagi. Hal tersebut tidak terlepas dari kebutuhan akan antisipasi ancaman maupun tantangan dari luar termasuk di dalamnya, untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia di wilayah negara lain serta wilayah internasional. Contohnya, melindungi keselamatan warga negara Indonesia yang sedang terancam jiwanya di wilayah maritim negara lain; memantau dan mengawasi kapal-kapal niaga Indonesia yang berlayar di jalur perairan Internasional serta; kepentingan untuk menjaga keamanan dan mencegah terjadinya konflik di laut cina selatan.

Di sadari pula bahwa kekuatan pertahanan saat ini masih belum ideal mengingat tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam rangka mencapai PMD sangat kompleks. Berbagai tantangan yang datang dari luar seperti pelanggaran batas wilayah kedaulatan, pencurian sumber daya laut, penyeludupan, serta perompakan jelas menjadi salah satu pertimbangan pembentukan kekuatan pertahanan yang tepat.

¹³ Kompas.com, "TNI Tambah Empat Satuan di Wilayah Timur, Koarmabar dan Koarmatim Ganti Nama", [https://nasional.kompas.com/read/2018/05/11/23072441/tni-tambah-empat-satuan-di-wilayah-](https://nasional.kompas.com/read/2018/05/11/23072441/tni-tambah-empat-satuan-di-wilayah-timur-koarmabar-dan-koarmatim-ganti-nama)

[timur-koarmabar-dan-koarmatim-ganti-nama](https://nasional.kompas.com/read/2018/05/11/23072441/tni-tambah-empat-satuan-di-wilayah-timur-koarmabar-dan-koarmatim-ganti-nama), dikutip pada 11 Mei 2018

¹⁴ *Ibid.*

Selain tantangan dan ancaman yang datang dari luar, terdapat pula tantangan yang datang dari dalam. Tantangan tersebut antara lain; separatisme, terorisme, serta konflik komunal bernuansa isu SARA. Secara lebih khusus, tantangan yang dapat mempengaruhi percepatan realisasi PMD adalah persoalan budaya. Budaya yang dimaksud adalah budaya bahari. Masyarakat Indonesia sudah terlalu lama memunggungi laut dan menggantungkan hidupnya pada pertanian serta perkebunan.

Pola pikir agraris masih mendominasi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Hal itulah yang membuat realisasi PMD masih jauh dari sempurna dan harus terus diusahakan. Dengan berbagai tantangan yang hadir, apa yang harus dilakukan Indonesia? Secara khusus, apa strategi pertahanan dan keamanan Indonesia dalam menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut? Jawabannya adalah melalui usaha untuk merealisasikan enam kepentingan pertahanan dan keamanan yang sebelumnya telah di jabarkan di atas. Realisasi kepentingan dan keamanan tersebut hanya mungkin dilakukan dengan pembentukan kekuatan pertahanan yang memadai.

Berbicara mengenai kekuatan pertahanan Indonesia, maka kita berbicara mengenai sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Adapun pembangunan pertahanan negara ini diselenggarakan untuk mewujudkan pertahanan militer dan nirmiliter menuju kekuatan maritim regional yang disegani di Kawasan Asia Pasifik dengan prinsip defensif aktif, dalam rangka menjamin kepentingan nasional. Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan melalui pembentukan kekuatan pertahanan baik pertahanan militer maupun nirmiliter.

Pembangunan kekuatan pertahanan militer terealisasikan melalui pemenuhan MEF. Sementara kekuatan pertahanan nirmiliter diarahkan pada pembangunan dan efektivitas peran kementerian/lembaga, serta masyarakat untuk mengantisipasi ancaman yang bersifat non-militer. Contoh nyata pengembangan kekuatan pertahanan nirmiliter (fungsi utama) adalah penegakan peraturan serta kebijakan KKP terkait pengawasan sumber daya laut dan perikanan. Selain itu, dalam Peraturan Kementerian Pertahanan tentang Perwujudan PMD, pembangunan kesadaran bela negara yang berorientasi budaya maritim pun dinilai perlu dilakukan. Pembangunan kesadaran bela negara adalah contoh pengembangan kekuatan nirmiliter yang menyasar seluruh lapisan masyarakat. Keseluruhan pembangunan kekuatan pertahanan baik militer maupun nirmiliter harus dijalankan untuk memastikan

kepemilikan *sea powers* (kekuatan maritim) Indonesia. Dr. Marsetio mengatakan bahwa ketika berbicara *sea powers* maka kita tidak hanya berbicara mengenai armada kapal perang saja tetapi juga melingkupi segala potensi kekuatan nasional yang menggunakan laut sebagai wahananya seperti penegak hukum di laut, armada kapal niaga, pelabuhan serta industri dan jasa maritim¹⁵.

Peningkatan MEF

Saat ini, kekuatan pertahanan militer Indonesia belum bisa dikatakan ideal. Hal tersebut berangkat dari kurangnya dana atau anggaran bagi pemenuhan kebutuhan militer Indonesia. Meskipun demikian, dengan kekurangan yang ada, Indonesia berusaha untuk mencapai standar kekuatan pertahanan militer yang sekiranya cukup untuk menopang tujuan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Standar kekuatan pertahanan militer inilah yang disebut sebagai MEF. Jadi, MEF itu sendiri bukan berada pada tingkat ideal melainkan hanya berada pada level standar. Hal itu juga diakui oleh Kolonel Cpl Dr. Herdi, SE, M.Sc yang mengatakan: “MEF berangkat dari

kebutuhan barang dan kebutuhan anggaran, MEF memang ditargetkan hingga tahun 2024, namun dari sisi anggaran, dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhan ideal yang memenuhi standar negara. MEF sendiri masih merupakan kebutuhan standar, bukan kebutuhan yang ideal”¹⁶. Pemenuhan MEF dalam rangka mendukung terealisasinya pertahanan dan keamanan yang cukup, setidaknya berangkat dari beberapa pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain; ancaman, anggaran serta kebijakan lainnya yang harus diakomodir¹⁷.

Adanya PMD sebagai strategi pembangunan Indonesia, mengharuskan kekuatan pertahanan di atas melakukan penyesuaian. Penyesuaian ini dapat terlihat melalui prioritas pemenuhan kebutuhan militer sejak dirilisnya PMD. Pemenuhan kekuatan pertahanan militer standar atau MEF memang terkait erat dengan kebutuhan militer apa yang harus dijadikan prioritas dalam menanggapi ancaman serta mengakomodir realisasi kebijakan pemerintah, demi mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini, pemenuhan MEF adalah juga

¹⁵ Laksamana TNI (Purn) Dr.Marsetio, *Sea Powers Indonesia*, (Jawa Barat: Universitas Pertahanan.2014).hlm.xix.

¹⁶ Wawancara dengan Kabagproglap, Baranahan, Kolonel Cpl Dr.Hardi, SE, M.Sc.

¹⁷ Wawancara dengan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kolonel Laut (p) Sugeng Suryanto, S.AP, M.AP.

untuk mengakomodir atau memberikan dukungan terhadap realisasi PMD.

Berbicara mengenai PMD, maka kita akan langsung merujuk pada peran penting TNI Angkatan Laut (AL) sebagai perwujudan nyata peran militer dalam merealisasikan PMD. Bagi Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio, M.M, TNI AL merupakan komponen utama pertahanan di laut dan menjadi salah satu faktor penting bagi kesuksesan pembangunan Indonesia sebagai PMD¹⁸. Akan tetapi dalam konteks yang lebih luas, pertahanan maritim dalam konteks PMD tidak hanya menyangkut peran TNI Angkatan Laut (TNI AL), tetapi juga melibatkan matra lainnya seperti TNI Angkatan Darat (TNI AD) dan TNI Angkatan Udara (TNI AU). Kapuslaik Baranahan, Laksma TNI Sri Yanto, S.T menegaskan demikian: *“Kekuatan utama dari PMD sendiri adalah laut dan udara, dikarenakan diatas laut selalu ada udara, dengan pengamanan wilayah udara sepanjang tahun. Dalam ruang lingkup yang keseluruhan kekuatan udara harus dibangun, kekuatan laut harus dibangun, namun begitu kekuatan darat pun tidak bisa ditinggalkan”*¹⁹.

Sinergi ketiga matra penting untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan akan

berujung pada efektivitas kebutuhan tersebut. Misalnya, TNI AD memiliki kebutuhan untuk membeli tank baru yang ditempatkan di wilayah Jawa, jika dikemudian hari ada pengerahan kekuatan ke luar wilayah pulau Jawa maka perlu dipikirkan juga pembelian kapal angkut tank TNI AL yang dapat mengangkut tank-tank bersangkutan. Inilah yang disebut sebagai integrasi antar matra dalam suatu sistem pergerakan TNI.

Hingga saat ini, secara keseluruhan pemenuhan MEF yang ditargetkan akan mencapai 100% pada 2024 sudah mencapai 61,9% dimana pada akhir 2019 diharapkan bisa mencapai 72%. Pemenuhan kekuatan pertahanan militer memang wajib dilaksanakan mengingat bahwa militer merupakan komponen utama atau garda terdepan dalam menghadapi berbagai ancaman berorientasi militer. Selain itu, kekuatan militer pun dapat digunakan untuk mendukung kekuatan nirmiliter dalam menghadapi ancaman non militer. Dalam mengamankan sumber daya laut misalnya, TNI digunakan untuk membantu KKP dalam bidang pengawasan sumber daya laut dan perikanan.

¹⁸ Ikahan.com, “IKAHAN Malam Ceramah Ke-6, Dr. Marsetio Membahas Tentang Poros Maritim dan Potensi Kerma”, <http://ikahan.com/2015/03/ikahan-malam-ceramah-ke-6-dr-marsetio-membahas->

[tentang-poros-maritim-dan-potensi-kerma/](#), diakses pada 25 Januari 2019.

¹⁹Wawancara dengan Laksma TNI Sri Yanto, Kementerian Pertahanan.

KKP

Sebagai kementerian yang menjalankan tugas pertahanannya yakni, bagian dari kekuatan nirmiliter bangsa (fungsi utama), KKP telah secara tegas mengeluarkan berbagai peraturan untuk menjamin kedaulatan wilayah perairan termasuk di dalamnya, untuk menghindari adanya pencurian sumber daya laut Indonesia. Untuk mewujudkan mimpi PMD yaitu, menjadikan laut sebagai masa depan bangsa, KKP bertanggung jawab dalam mengawasi serta mengelola sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia. Banyaknya praktik *illegal fishing* telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Indonesia dan jika dibiarkan, maka sumber daya laut Indonesia akan habis terkuras.

Melalui berbagai peraturan tentang izin penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, KKP berusaha untuk mengawasi dan mengelola sumber daya laut agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Indonesia tanpa mengesampingkan kelestarian sumber daya laut yang ada. Unit kerja KKP yang bertanggung jawab dalam pengawasan sumber daya laut adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan (DJPSDKP). Unit kerja ini berfokus pada pilar pertama dari tiga pilar yang telah ditetapkan oleh KKP. Ketiganya adalah pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Di bawah pilar kedaulatan, DJPSDKP menjalankan fungsinya untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk melaksanakan fungsinya, DJPSDKP pun dibantu oleh beberapa instansi yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) 115.

Satgas 115 merupakan gabungan dari beberapa instansi seperti KKP, TNI AL, Polair, Bakamla, dan Kejaksaan. Menteri KKP merupakan ketua dari Satgas 115 dibantu oleh Wakil Kepala Staf TNI AL sebagai kepala pelaksana hariannya²⁰. Satgas ini secara resmi dibentuk pada 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- (1) Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh

²⁰ Hasil wawancara dengan Pak Sahono, Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Humas DJSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada 28 Januari 2019.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya.

- (2) Tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini juga meliputi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*)²¹.

Adapun dalam menjalankan fungsi atau tugasnya, Satgas memerlukan kerjasama yang baik di antara setiap instansi terlibat. Contohnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara”²². Koordinasi ini diperlukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang justru tidak memberi efek jera pada para pelanggar peraturan.

Optimalisasi kerja KKP dalam menegakkan pilar kedaulatannya sangat bergantung pada kerjasama baik diantara

instansi-instansi terkait di atas. Hingga saat ini, kinerja KKP telah mulai menampilkan hasil yang cukup memuaskan meskipun perlu diakui dalam realisasinya, masih terdapat kendala seperti kurangnya perlengkapan serta sumber daya manusia.

Beberapa hasil yang cukup memuaskan namun perlu terus dikembangkan oleh KKP antara lain: meningkatnya nilai tukar rata-rata termasuk nilai tukar nelayan, meningkatnya PDB di sektor perikanan, hingga peningkatan konsumsi ikan nasional. Peningkatan-peningkatan ini jelas merupakan beberapa indikator adanya peningkatan dalam hal pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi, meskipun keberadaan Satgas 115 efektif dalam menyelesaikan persoalan pengawasan dan pengelolaan sumber daya perikanan, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa keberatan terhadap hadirnya Satgas 115, terutama hadirnya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 yang disinyalir bertabrakan dengan Undang-Undang. Setidaknya tercatat tiga Undang-Undang yang dilanggar melalui penetapan Peraturan Presiden No.115 Tahun 2015. Ketiga Undang-Undang tersebut yakni, Undang-Undang Kelautan No.34 Tahun 2014, Undang-Undang No.3 Tahun

²¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015, Pasal 2.

²² *Ibid.*, Pasal 3.

2002 tentang Pertahanan Negara, serta Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Satgas 115 yang dibentuk melalui Peraturan Presiden No.115 memiliki beberapa tugas salah satunya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3C yakni, “membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal”²³. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kelautan No. 34 Tahun 2014 pasal 62C disebutkan bahwa salah satu tugas Bakamla adalah untuk melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia²⁴. Kedua pasal ini tidak bersesuaian, dalam konteks penegakkan hukum di wilayah perairan. Hal ini akan mengaburkan batasan fungsi kedua instansi tersebut dan jika tidak diantisipasi dapat memotong peran salah satu instansi dalam realisasi pengamanan wilayah perairan mengingat *illegal fishing* merupakan bagian dari tantangan terhadap keamanan wilayah perairan Indonesia.

Sementara itu, Peraturan Presiden No.115 Tahun 2015 Pasal 3D yakni

“melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf c yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di dalam Satgas” jelas bertentangan pula dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 2 yang menyatakan bahwa Panglima TNI lah yang berhak untuk menyelenggarakan strategi serta operasi militer termasuk di dalamnya, pembinaan profesi dan kekuatan militer. Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mengatakan bahwa pernyataan mengenai komando dan pengendalian dalam Peraturan Presiden No.115 Tahun 2015 pasal 3D sangat identik dengan sebgaiian tugas pokok dari Panglima TNI²⁵.

Selain itu, pasal yang sama juga menabrak Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 19 ayat 1. Dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No.34 Tahun 2004 disebutkan bahwa tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada dibawah kendali

²³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal, Pasal 3C

²⁴ Undang-Undang tentang Kelautan No. 34 Tahun 2014, Pasal 62C.

²⁵ Anonim, “Perpres Satgas Kelautan Tak Boleh Tabrak Undang-Undang”, dalam <https://sp.beritasatu.com/home/perpres-satgas-kelautan-tak-boleh-tabrak-undang-undang/104141>, diakses 20 Januari 2019

panglima TNI. Menurut Junisab, selain masalah di atas, terdapat juga masalah terkait wewenang wakasal dalam Peraturan Presiden No.115 Tahun 2015 tersebut. Disebutkan bahwa pelaksana harian satgas adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) padahal menurutnya, sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku, dalam tata kelola komando serta pengendalian TNI sama sekali tidak ada otoritas Wakasal karena tugas tersebut berada pada level Panglima Armada²⁶.

Meskipun terjadi peningkatan pengawasan di wilayah perairan khususnya *illegal fishing*, yang dapat memberikan keuntungan besar bagi Indonesia dalam mempertahankan sumber daya serta meningkatkan perekonomian berbasis maritim, kita perlu memperhatikan pertentangan yang terjadi dalam konteks peraturan di atas. Bertabrakannya Undang-Undang dan Peraturan yang ada justru dapat memperlemah peran instansi terkait dalam pengamanan wilayah maritim ke depannya dan hal tersebut dapat menjadi celah terjadinya pelanggaran kedaulatan di wilayah perairan Indonesia dikemudian hari.

Kesadaran Identitas Bangsa Maritim

Dalam memaknai pilar pertama PMD, peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia sebagai bangsa maritim kiranya perlu dipahami dalam konteks yang lebih mendalam. Konteks yang dimaksud adalah sejauh mana pembentukan identitas suatu masyarakat akan membantu pemerintah mengontrol masyarakatnya. Pembentukan identitas merupakan salah satu kekuatan yang bersifat “radikal”. Jika kembali pada pemahaman kekuatan atau power, kita mendapati bahwa makna *power* adalah untuk mengarahkan pihak lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Salah satu bentuk kekuatan paling radikal, yang dapat membuat orang dengan mudah bisa diarahkan adalah dengan pembentukan identitas. Identitas lekat dengan persoalan budaya. Itu sebabnya, membangun kembali budaya maritim adalah sama dengan pemberian (kembali) identitas masyarakat.

Persoalannya, pembangunan identitas bangsa maritim harus pula diikuti oleh peningkatan sumber daya manusia berbasis maritim. Seberapa siap kita menghadapi segala macam tantangan maritim serta seberapa siap kita merealisasikan cita-cita

²⁶ Ibid.

PMD juga bergantung pada sumber daya manusia yang berciri maritim.

Dalam wawancara dengan peneliti CSIS ditemukan bahwa dalam merealisasikan PMD, Indonesia belum maksimal dalam pembangunan sumber daya manusia berbasis maritim. Hal tersebut dapat terlihat dari masih sedikitnya sekolah kelautan (atau kemaritiman) di Indonesia jika dibandingkan dengan Tiongkok yang memiliki sekolah kelautan di hampir setiap provinsi²⁷.

Penggunaan Diplomasi Pertahanan sebagai Instrumen untuk Menangkal Tantangan BRI

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, dewasa ini sangat mustahil bagi suatu negara untuk tidak melakukan kerjasama. Itu sebabnya sebuah kerjasama antar negara wajib dilaksanakan.

Persoalannya, kerjasama antar negara juga memiliki tantangan bahkan potensi ancaman yang selalu hadir mengikutinya. Tantangan yang hadir bisa jadi berasal dari ketidak-seimbangan kekuatan di antara negara yang bekerjasama.

Kekuatan suatu negara memang sering diidentikan dengan adanya kekuatan militer dan ekonomi yang besar. Tiongkok dalam perkembangannya, memiliki kedua kekuatan tersebut. Saat ini, kekuatan ekonomi

Tiongkok merupakan yang terkuat di dunia disertai dengan pesatnya peningkatan militernya. Jika dihadapkan pada kekuatan tersebut, Indonesia belum mampu untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok. Dan hal itu jelas merupakan tantangan yang harus diantisipasi.

Meskipun memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang masih kurang untuk menyeimbangkan Tiongkok, Indonesia masih mempunyai kekuatan yang berkaitan dengan peran serta pengaruhnya di wilayah regional. Pengaruh Indonesia di wilayah regional sangatlah besar, sementara wilayah regional (ASEAN) merupakan mitra dagang terbesar Tiongkok saat ini. Pengaruh ini merupakan kekuatan yang dapat digunakan untuk menekan tantangan yang mungkin muncul. Salah satu cara untuk terus mempertahankan pengaruh adalah dengan meningkatkan diplomasi, termasuk di dalamnya diplomasi pertahanan.

Diplomasi Pertahanan merupakan *instrument* kekuatan yang dapat dipakai untuk menyeimbangkan kekuatan, mengingat kemampuan militer dan ekonomi Indonesia belum memadai dalam menangkal potensi ancaman dari negara besar. Berhadapan dengan negara besar seperti Tiongkok, aktivitas diplomasi pertahanan

²⁷ Wawancara dengan Vera – CSIS, di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara pada 21 Februari 2019.

sendiri sudah mulai dilakukan meskipun masih memerlukan optimalisasi.

Beberapa aktivitas diplomasi pertahanan yang sudah dilakukan terkait dengan Tiongkok antara lain; 1) Upaya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada 2018 untuk mengajak negara anggota ASEAN melakukan patroli bersama di Laut Cina Selatan, dan 2) Adanya pembahasan mengenai peningkatan kerjasama Industri Pertahanan antara Tiongkok dan Indonesia dalam pertemuan tahunan “*The 7th Defence Industry Cooperation Meeting RI-China*” yang diselenggarakan pada Agustus 2018 lalu.

Sebenarnya, wadah kerjasama bilateral dalam konteks pertahanan ini bermula dari komitmen Indonesia dan Tiongkok untuk merealisasikan kerjasama di bidang industri pertahanan pada 2011 lalu. Setahun kemudian, tepatnya pada 2012 diselenggarakan *The Defense Industry Cooperation Meeting RI-China* yang pertama untuk merealisasikan komitmen tersebut. Pertemuan tersebut dilaksanakan secara berkala hingga kini.

Pada 2014 Indonesia melalui Bakorkamla RI telah melaksanakan aktivitas diplomasi pertahanan dengan Tiongkok. Aktivitas tersebut terealisasikan dalam

penanda-tanganan nota kesepahaman perjanjian kerjasama (MOU) antara Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla (saat ini disebut Bakamla) RI Laksamana Madya (TNI) Dr. DA Mamahit dengan *China National Space Administration*, yang diwakili oleh Xie Fang. MoU ini menyangkut penginderaan satelit untuk pengawasan wilayah perairan²⁸.

Aktivitas diplomasi pertahanan merupakan langkah strategis mengingat kebutuhan dan keterbatasan yang dimiliki oleh Indonesia di bidang pertahanan. Dengan adanya kerjasama industri pertahanan misalnya, peningkatan teknologi militer pun dapat terlaksana. Perkembangan industri pertahanan Tiongkok yang kian hari kian pesat, dapat dijadikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan industri pertahanan dalam negeri melalui kerjasama yang efektif. Pun dalam konteks mencapai PMD, diplomasi pertahanan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan maritim seperti kerjasama teknologi penginderaan satelit serta patroli bersama. Diplomasi Pertahanan dengan demikian dapat menciptakan peluang bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam lingkup pertahanan. Selain memenuhi kebutuhan, diplomasi pertahanan

²⁸ Anonim, Mamahit dan Xie Fang Teken MoU Penginderaan Satelit Laut, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/08/m>

[amahit-dan-xie-fang-teken-mou-penginderaan-satelit-laut](#), diakses 8 Februari 2019.

pun digunakan untuk memblokir adanya kemungkinan konflik (*conflict prevention*) melalui peningkatan rasa saling percaya (*CBM/ Confidence Building Measure*).

Dengan adanya aktivitas diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok, diharapkan terjadi peningkatan rasa saling percaya diantara keduanya. Rasa saling percaya di antara keduanya dapat meminimalisir tantangan yang muncul di antara kerjasama keduanya, termasuk, kerjasama dalam wadah BRI. Dengan minimalisasi tantangan, maka peluang PMD pun dalam BRI dapat dioptimalkan.

Selain hal di atas, untuk menangkap peluang PMD dalam BRI, diplomasi pertahanan dapat pula digunakan Indonesia untuk menghadirkan harmonisasi di antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Harmonisasi ini penting mengingat pengaruh persaingan di antara kedua negara tersebut sangat besar di kawasan. Misalnya, aktivitas *joint patrol* di wilayah laut Natuna. Pada 2018, Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanannya, James Mattis menyatakan keterbukaan Amerika Serikat untuk ikut terlibat dalam *joint patrol* pengawasan Laut Cina Selatan termasuk Laut Natuna²⁹.

Selain aktivitas seperti *joint patrol*, pertemuan Menteri-menteri pertahanan yang tergabung dalam ADMM Plus juga dapat digunakan sebagai wadah diskusi terkait hal-hal pertahanan, dan juga membangun rasa percaya (CBM) di antara anggotanya. ADMM Plus melibatkan tidak hanya negara ASEAN tetapi juga Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai dua negara besar yang saat ini memiliki pengaruh besar di wilayah kawasan.

Grand Strategy PMD dan Power didalamnya

Adanya tantangan yang muncul dari perkembangan lingkungan baik dalam maupun luar negeri membuat Indonesia perlu melihat strategi besar apa yang dapat merangkum seluruh pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan nasional. PMD lah yang dipakai oleh pemerintahan Joko Widodo untuk mewadahi itu semua. Karena keterkaitannya dengan tujuan nasional, maka tidak mengherankan jika PMD dipandang sebagai *grand strategy* Indonesia. Pertanyaannya, seberapa efektif PMD dalam merealisasikan tujuan nasional Indonesia?

Berbicara mengenai efektivitas suatu *grand strategy* maka kita secara serempak

²⁹Yoga Sukmana, "AS Ingin Ikut Patroli di Laut Natuna", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/23/13035>

[051/as-ingin-ikut-patroli-di-laut-natuna](https://nasional.kompas.com/read/2018/01/23/13035) diakses pada 9 Februari 2019.

pula harus berbicara kekuatan/kekuasaan (*power*) di dalamnya. *Power* adalah salah satu unsur terpenting dalam sebuah *grand strategy*. Dalam mencapai tujuan nasional, suatu negara perlu memiliki kekuatan yang cukup. Kekuatan ini harus dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dalam suatu strategi besar yang komprehensif. Maka, kekuatan (*power*) adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah *grand strategy*. Hal tersebut bersesuaian dengan teori pembentukan *grand strategy* dari Drew dan Snow yang berpendapat bahwa *grand strategy* melingkupi seluruh instrument kekuatan nasional yang diintegrasikan untuk mencapai tujuan nasional. Jika digambarkan dalam bentuk tabel, berikut ini unsur kekuatan di dalam PMD.

Tabel 1. PMD dan Unsur Power di dalamnya

5 Pilar PMD	Unsur Power
Budaya Maritim	Radical Power
Pengelolaan Sumber Daya Laut dan peningkatan kesejahteraan nelayan	<i>Economic Power</i> , Kekuatan Nirmiliter (<i>Lembaga /Kementerian</i> . Contoh: KKP)
Pembangunan Infrastruktur	<i>Economic Power</i>
Diplomasi Maritim	<i>Soft Power</i>
Pertahanan Maritim	<i>Hard Power</i> (Peningkatan kekuatan militer) dan <i>Soft Power</i> (Peningkatan Diplomasi Pertahanan)

Sumber: Hasil Olahan Pribadi, 2019

Bagaimana menerapkan kekuatan diatas dalam konteks *grand strategy*? Sesuai dengan teori Drew dan Snow, sebuah *grand strategy* dibentuk hanya jika sebuah tujuan nasional telah disepakati. Sebagaimana negara lainnya, tujuan nasional Indonesia pun tidak terlepas dari cita-cita kesejahteraan, pertahanan dan keamanan.

Indonesia perlu melihat kekuatan-kekuatan nasional apa yang dapat diarahkan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Indonesia dengan luar wilayah perairan yang lebih besar dibandingkan luas daratan menyadari pentingnya mengoptimalkan wilayah ini. Di dalam wilayah terkandung sumber daya yang jika dikelola dengan baik akan berujung pada pembangunan nasional. Selain luas dan kayanya wilayah perairan Indonesia, pemerintah pun melihat peluang terhadap posisi Indonesia sebagai jalur perlintasan antar negara. Posisi Indonesia sebagai negara perlintasan jelas berpotensi membawa keuntungan terlebih arah arus perekonomian kini sudah bergeser dari Barat ke Asia. Melihat potensi kekuatan yang ada, maka terbentuklah PMD.

Grand strategy PMD dengan demikian menjadi suatu kesatuan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Melalui penetapan PMD sebagai *grand strategy*, pemerintah pun mendapatkan dasar dari pengaturan, perkembangan serta

penggunaan kekuatan nasional yang diarahkan pada pemenuhan tujuan nasional Indonesia. Dengan menjadikan PMD sebagai *grand strategy*, maka realisasinya resmi menjadi kepentingan nasional Indonesia.

Pertanyaannya sekarang, apakah *grand strategy* PMD efektif untuk menangkali tantangan yang ada bagi perwujudan tujuan nasional? Sebelum melihat apakah PMD merupakan *grand strategy* yang efektif, kita terlebih dahulu harus memeriksa sejauh mana daya kekuatan serta maksimalisasi kekuatan *grand strategy* tersebut. Karena pada hakikatnya, kekuatan (*power*) lah yang memungkinkan suatu *grand strategy* berjalan sesuai tujuannya yakni, mencapai tujuan nasional.

Power dapat dimaknai sebagai kekuasaan ataupun kekuatan. Keduanya tak bisa dipisahkan dan dalam artian tertentu memiliki makna yang sama. *Power* secara umum dipahami sebagai kemampuan untuk memperoleh apa yang diharapkan. Dalam ilmu politik, *power* dimengerti sebagai kemampuan yang bergerak dalam suatu relasi, yakni, kemampuan untuk mempengaruhi orang atau pihak lain untuk melakukan sesuatu bukan berdasarkan keinginan mereka tetapi keinginan kita. *Power* dalam arti sempit bahkan bisa

diartikan sebagai kemampuan untuk menghukum ataupun memberi penghargaan.

Adapun *power* dalam perkembangannya memiliki tiga "wajah" Atau bentuk. Pertama, *power* dipahami dalam konteks pemilihan keputusan (*decision-making*) dimana *power* adalah mengenai kemampuan untuk membentuk tindakan atau keputusan pribadi lainnya. *Power* sebagai kemampuan pembentuk pilihan keputusan dapat dibagi ke dalam tiga cara: 1) Dengan intimidasi, 2) Kesadaran akan hal yang dapat saling menguntungkan, 3) Pembentukan kewajiban, kesetiaan dan komitmen³⁰.

Wajah *power* kedua dapat berbentuk kemampuan untuk mencegah suatu keputusan dibuat. Sementara wajah *power* ketiga adalah kemampuan untuk mengontrol pikiran orang lain. Kemampuan ini terdiri dari kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara membentuk cara berpikir, keinginan dan kebutuhan orang tersebut. Bentuk *power* ketiga seringkali dipahami sebagai bentuk yang paling Radikal mengingat hal tersebut biasanya terkait erat dengan proses kontrol psikologi dan budaya dimana pihak tersebut berada³¹.

³⁰ Andrew Heywood, *Key Concepts in Politics* (New York, Palgrave Mcmillan, 2000), hlm.35.

³¹ *Ibid.*,

Dalam PMD jika kita ingin melihat sejauh mana kekuatan (*power*) nya yang ada, maka kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu jenis *power* apa yang digunakan di dalamnya. Dilihat dari pilar pertama dalam PMD maka kita bisa melihat bahwa ada proses pembentukan kesadaran budaya Maritim pada masyarakat Indonesia. Hal ini jelas lekat dengan penanaman pola pikir berbasis maritim pada setiap insan Indonesia. Penanaman pola pikir berbasis maritim suatu saat akan dapat mengubah tidak hanya cara pandang tetapi juga keinginan serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal tersebut sangatlah wajar mengingat baik keinginan maupun kebutuhan adalah cerminan dari kepribadian kita. Sementara itu, kepribadian kita adalah hasil dari pola pikir kita dan merupakan identitas kita. Maka, pola pikir sangat berpengaruh besar terhadap identitas kita. Dengan mengarahkan pola pikir masyarakat Indonesia untuk kembali pada identitas bangsa maritim, Indonesia sedang merealisasikan bentuk *power/kekuatan* atas masyarakatnya. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman *power* yang disampaikan oleh seorang filsuf Perancis, Michel Foucault. Baginya, *power* dan pengetahuan adalah dua hal yang sama.

Pengetahuan adalah *power*. Dalam konteks ini, pengetahuan diartikan sebagai

definisi. Untuk bisa menguasai sesuatu termasuk sekelompok orang, kita harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan atasnya. Kita harus bisa mendefinisikan kelompok masyarakat itu. Mendefinisikan artinya memberikan identitas pada kelompok masyarakat tersebut. Dengan pemberian identitas tersebut maka kita juga memiliki *power* atasnya. Dalam konteks PMD, pemberian identitas terealisasi dalam pembangunan kembali kepribadian masyarakat berbasis maritim. Pembangunan kepribadian artinya membangun kesadaran.

Pembangunan kesadaran sebagai bangsa maritim bukanlah pekerjaan mudah karena menyangkut perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir harus terwadahi dalam suatu sistem, salah satunya melalui Pendidikan. Sayangnya, Pendidikan berbasis maritim di Indonesia masih kurang dijalankan. Sekolah kelautan dan kemaritiman belum banyak dibuka. Hal tersebut memperlambat proses pembentukan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. Ini merupakan tantangan Indonesia karena keberhasilan dalam membangun kesadaran budaya maritim merupakan hal yang wajib dilakukan agar pemerintah dapat dengan mudah mengarahkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan tujuan nasional yang akan dicapai.

Pertanyaan mengenai efektivitas PMD sebagai *grand strategy* adalah juga pertanyaan mengenai sejauh mana *power* dalam PMD diatas bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Sejauh mana *power* tersebut terealisasikan? Secara ideal, *power* sebagai kemampuan untuk mengontrol cara pikir masyarakat perlu dilaksanakan pemerintah secara menyeluruh. Jika sudah menyeluruh, maka kekuatan pemerintah atas masyarakatnya akan menjadi penuh. Dalam arti, pemerintah dapat dengan mudah mengarahkan masyarakat pada suatu tujuan bersama.

Dalam perkembangannya, Indonesia masih harus berjuang untuk mencapai nilai ideal dari bentuk *power* ini. Di lapangan, pembangunan budaya serta identitas maritim masih menghadapi kendala. Salah satu kendala yang juga disadari oleh pemerintah adalah masih lekatnya identitas agraris dalam diri manusia Indonesia. Ini merupakan tugas besar pemerintah mengingat keberhasilan membentuk identitas masyarakat maritim sangat berpengaruh pada efektivitas *power* di dalamnya. Selain itu, minimnya Pendidikan berbasis maritim menambah deretan kendala bagi terwujudnya bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim.

PMD juga tidak hanya terkait dengan persoalan dalam negeri seperti penegakan

peraturan di wilayah perairan serta pembentukan identitas bangsa di atas, tetapi juga terkait erat dengan kepentingan luar negeri Indonesia. *Grand strategy* menjadi jembatan bagi kepentingan dalam dan luar negeri Indonesia. Kepentingan baik dalam dan luar negeri akan bermuara pada satu tujuan yakni menciptakan kesejahteraan dan keamanan seluruh masyarakat serta wilayah Indonesia.

Kepentingan untuk menjaga keamanan wilayah Indonesia mengharuskan pemerintah untuk membaca situasi yang sedang terjadi di lingkungan internasional.

Menguatnya kekuatan Tiongkok yang ditandai dengan peningkatan ekonomi dan militernya, peningkatan persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, serta adanya pergeseran arus ekonomi dari barat ke wilayah Timur perlu menjadi pertimbangan Indonesia dalam membuat strategi.

Adanya pergeseran arus diatas, jalur laut lintas menjadi sangat penting. Mengapa? Karena jalur laut sangat diperlukan dalam proses distribusi barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Hal ini tentu menjadi peluang atau keuntungan bagi negara yang berada di jalur perlintasan seperti Indonesia. Peluang ini yang berusaha dimaksimalkan oleh pemerintah melalui pembangunan infrastruktur maritim Indonesia. Pembangunan infrastruktur

maritim dengan demikian, tidak hanya ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia tetapi juga untuk menjawab peluang yang ditawarkan oleh situasi global saat ini.

Pembangunan infrastruktur maritim memang terkait erat dengan pembangunan perekonomian bangsa. Namun, ketika kita berbicara mengenai pembangunan infrastruktur maka kita perlu berbicara mengenai pengamanan laut. Pengamanan laut terealisasi melalui penegakan peraturan serta peningkatan kemampuan pertahanan militer di wilayah perairan Indonesia. Salah satu pilar dari PMD adalah meningkatkan kekuatan pertahanan maritim. Kekuatan pertahanan maritim adalah salah satu bentuk kekuatan maritim (*sea power*). Kekuatan lainnya adalah kekuatan ekonomi. Inilah yang ingin dibangun oleh Indonesia.

Persoalannya, belum idealnya pemenuhan kebutuhan militer (MEF) serta berbagai masalah keamanan yang muncul secara serempak menunjukkan bahwa sebagai sebuah *grand strategy* Indonesia masih harus berbenah. Berbenah lebih mengacu pada peningkatan kekuatan secara keseluruhan yang meliputi: Peningkatan kemampuan militer Indonesia melalui pemenuhan MEF, pembentukan kesadaran bela negara berbasis maritim, percepatan

pembangunan infrastruktur, dan penegakan hukum serta peraturan di wilayah perairan Indonesia terutama dalam hal keselarasan Undang-Undang serta peraturan yang dibuat.

Dari penjabaran di atas kita bisa melihat bahwa strategi PMD dibuat sebagai suatu strategi komprehensif pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan baik persoalan dalam maupun luar negeri. PMD hanya mungkin dikatakan efektif jika secara menyeluruh mampu mengatasi tantangan yang ada hingga tujuan nasional Indonesia tercapai. Pertanyaannya, apakah strategi PMD Ideal dan efektif untuk menyelesaikan tantangan yang datang dari negara maju seperti Tiongkok, khususnya dalam konteks BRI?

Dengan masuknya Indonesia sebagai salah satu negara perlintasan jalur BRI, maka terbuka pula kerjasama pembangunan infrastruktur dengan pihak Tiongkok. Meskipun Indonesia terbuka terhadap kerjasama tersebut, pemerintah tetap perlu mewaspadaikan fakta dilapangan terkait persoalan-persoalan seperti; konflik laut Cina Selatan, tantangan terhadap hutang yang tak terbayar, *illegal fishing* kapal nelayan Tiongkok, peningkatan kekuatan militer Tiongkok serta persaingan negara tersebut dengan Amerika Serikat di wilayah kawasan. Selain itu, perlu juga diwaspadai sejauh mana

realisasi kerjasama yang terbangun antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok.

Cita-cita Indonesia untuk menjadi kekuatan maritim tangguh di dunia tentu pertama-tama dibuktikan dalam wilayah Kawasan. Artinya, Indonesia harus terlibat dalam pengamanan wilayah laut Kawasan, tak terkecuali wilayah Laut Cina Selatan.

Persoalan Laut Cina Selatan serta persoalan wilayah maritim lainnya antara Tiongkok dan Indonesia perlu diperhatikan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pertahanan berkaitan dengan proyek BRI. Berbicara mengenai BRI dalam bidang pertahanan, tidak akan bisa dilakukan tanpa memperhitungkan kekuatan baik militer maupun nirmiliter Tiongkok. Dalam buku *The Military Balance* 2018, kekuatan militer Tiongkok masuk sebagai salah satu kekuatan militer terkuat di dunia saat ini. Pada 2017 misalnya, anggaran pembelanjaan keperluan militer Tiongkok naik hingga 24,8%. Dengan presentase tersebut, anggaran pembelanjaan keperluan militer Tiongkok mencapai 150.458.000 Dollar AS. Sementara anggaran belanja militer Indonesia pada tahun yang sama hanya berkisar 8.981.000 Dollar AS. Selain perbandingan anggaran belanja militer yang tinggi, Tiongkok juga memiliki pasukan aktif sebanyak 2.035.000 sementara Indonesia

hanya memiliki 396.000 pasukan aktif (data 2018).

Dilihat dari data yang ada, maka Indonesia tidak bisa begitu saja mengesampingkan kemungkinan akan adanya tantangan yang bisa datang kapan saja dari pihak Tiongkok. Hal tersebut mungkin saja terjadi mengingat Indonesia saat ini aktif menegaskan kedaulatan di wilayah perairan Indonesia termasuk di dalamnya, menindak kapal-kapal asal Tiongkok yang menangkap ikan secara *illegal*. Konfrontasi bisa saja terjadi mengingat kapal-kapal nelayan tersebut selalu dilengkapi dengan kapal patroli pemerintah Tiongkok dalam melancarkan aksinya.

Terlepas dari berbagai persoalan serta tantangan di atas, kita tetap perlu mengingat bahwa BRI adalah proyek yang berbasis kepentingan ekonomi dan bukan politik. Komitmen untuk menempatkan kepentingan ekonomi sebagai jiwa dari proyek BRI dapat dimanfaatkan oleh PMD untuk membangun kekuatan maritim Indonesia. Proyek BRI dapat memberikan keuntungan baik itu pembangunan infrastruktur maritim maupun keuntungan finansial di masa datang.

Ditinjau dari konteks kekuasaan, PMD efektif berhadapan dengan BRI jika mempertahankan bentuk kekuasaan yang berlaku diantara keduanya tetap pada posisi

“saling menguntungkan”. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa bentuk kekuasaan salah satunya adalah kemampuan untuk mengubah keputusan (*decision-making*). Bentuk *power* ini terealisasi setidaknya dalam 3 cara yakni, intimidasi, kesadaran akan kemungkinan saling menguntungkan, serta pembentukan kesetiaan dan komitmen.

Idealnya, kerjasama pembangunan infrastruktur serta ekonomi di antara Tiongkok dan Indonesia harus berpegang pada bentuk kekuasaan ketiga yakni, pembentukan kesetiaan dan komitmen. Jika belum bisa dilakukan, maka cara kedua adalah yang paling standar, yang tetap harus dipertahankan yaitu, kesadaran akan hasil yang bisa saling menguntungkan kedua belah pihak. Kekuatan ekonomi Tiongkok perlu kita lihat sebagai suatu kesempatan untuk membangun kekuatan ekonomi nasional Indonesia. Sementara pembangunan kekuatan militernya harus dipahami sebagai konsekuensi logis dari besarnya nilai ekonomi yang harus dijaga oleh Tiongkok. Negara yang besar memerlukan pertahanan yang besar pula. Hal itu berlaku terlebih bagi Tiongkok yang kini

merupakan ancaman besar bagi Amerika Serikat dan negara kuat lainnya.

Dengan kata lain, Indonesia perlu mempertahankan bentuk kekuasaan yang berlaku diantara Tiongkok dan Indonesia sebagai “yang saling menguntungkan” sembari menentukan langkah tepat untuk meningkatkan cara *power* bekerja di dalam relasi keduanya ke arah yang lebih baik yakni, kesetiaan dan komitmen. Sementara itu, intimidasi adalah cara berkuasa yang perlu dihindari dalam usaha merealisasikan baik PMD maupun BRI. Intimidasi inilah yang harus dicegah. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencegah penggunaan intimidasi adalah dengan membangun rasa saling percaya.

Diplomasi Pertahanan dan Power dalam BRI

Menurut Gregory Winger, diplomasi pertahanan merupakan bagian dari *soft power* yang bersifat langsung³². Bersifat langsung memiliki makna bahwa kekuatan ini dilaksanakan dalam relasi antar perwakilan negara. Dengan menggunakan personil militer, diplomasi pertahanan dibentuk tidak hanya sebagai saluran perdamaian tetapi juga sebagai cara untuk mengkomunikasikan ide, pandangan dunia, bahkan pilihan

³² Gregory Winger, "The Velvet Theory: A Theory of Defense Diplomacy", dalam <http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting->

[fellows-conferences/vol-xxxiii/the-velvet-gauntlet/](http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxxiii/the-velvet-gauntlet/), diakses pada 12 Agustus 2018

kebijakan suatu negara. Aktivitas ini bertujuan untuk merawat dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Berkaca pada teori Winger serta keterbatasan Indonesia dalam menghadapi tantangan dari Tiongkok, maka peneliti melihat bahwa diplomasi pertahanan adalah cara yang tepat untuk menutupi kekurangan dan meningkatkan peluang kerjasama diantara kedua negara.

Pada data yang disampaikan sebelumnya, kekuatan ekonomi dan militer (*hard power*) Tiongkok masih jauh lebih besar diatas Indonesia. Untuk mengantisipasi penggunaan atau pengarahannya kedua kekuatan tersebut dikemudian hari, Indonesia perlu untuk meningkatkan kepercayaan diantara keduanya. Membangun kepercayaan merupakan salah satu tugas pokok diplomasi pertahanan dengan tujuan untuk menghilangkan potensi konflik dan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. Tujuan ini merupakan indikator dari keberhasilan suatu diplomasi pertahanan.

“Saling menguntungkan” dari kerjasama kedua negara merupakan salah satu bentuk kekuatan sebagaimana yang disampaikan oleh Heywood mengenai wajah *power*. Tugas dari diplomasi pertahanan dilihat dari sudut pandang *power* adalah mempertahankan kerjasama yang saling

menguntungkan dan menekan potensi intimidasi. Jika dioptimalkan, diplomasi pertahanan pun dapat mengangkat relasi Tiongkok dan Indonesia pada tataran yang lebih tinggi yakni kesetiaan dan komitmen.

Dari hasil wawancara dan juga penelitian pustaka ditemukan bahwa dalam kaitannya dengan Tiongkok, Indonesia pernah melaksanakan aktivitas diplomasi pertahanan yakni, dengan mengadakan patroli bersama untuk mengamankan wilayah Laut Cina Selatan. Patroli bersama ini dilaksanakan dalam wadah kerjasama ASEAN dan Tiongkok.

Sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan dalam bidang Diplomasi Pertahanan, terutama untuk mendukung kerjasama BRI antara Tiongkok dan Indonesia. Aktivitas seperti peningkatan kerjasama industri pertahanan, pertukaran informasi intelijen yang berhubungan dengan kepentingan maritim bersama, hingga latihan gabungan personil militer adalah beberapa kegiatan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memupuk sikap saling percaya.

Meningkatnya rasa percaya Tiongkok kepada Indonesia akan semakin mengurangi potensi penyerangan negara tersebut. Dengan kata lain, diplomasi pertahanan dapat dipakai sebagai alat untuk menekan bentuk kuasa (*power*) intimidasi muncul

dalam relasi antara Tiongkok dan Indonesia, khususnya dalam BRI sehingga Indonesia bisa menggunakan peluang pembangunan yang ditawarkan secara maksimal. Dengan demikian, cita-cita PMD untuk membangun infrastruktur maritim yang mumpuni pun akan cepat terwujud.

Dalam konteks yang lebih besar, Diplomasi Pertahanan pun dapat digunakan Indonesia untuk menghadapi tantangan yang datang dari peningkatan persaingan diantara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Wadah bersama seperti ADMM plus ataupun *joint patrol* bisa digunakan oleh Indonesia untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan terhadap potensi ancaman yang datang dari persaingan kedua negara tersebut. Di sini, wadah *ADMM Plus* dan *joint patrol* digunakan untuk meningkatkan CBM melalui keterbukaan masing-masing negara anggota termasuk di dalamnya Indonesia, Tiongkok dan Amerika Serikat.

Kesimpulan

Dari pembahasan di dalam tesis ini, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Kekuatan-kekuatan yang terkandung dalam PMD harus ditingkatkan agar PMD sebagai *grand strategy* dapat berjalan efektif. Efektivitas *grand strategy* dapat terlihat melalui sejauh mana *grand*

strategy tersebut mampu mengantisipasi tantangan yang muncul baik dalam maupun luar negeri termasuk di dalamnya tantangan yang muncul dari BRI. Dan untuk mampu mengatasi tantangan atau potensi ancaman, pembangunan kekuatan mulai dari realisasi MEF, pengelolaan dan pengawasan sumber daya laut, hingga pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan baik. Adapun secara khusus, tantangan BRI dalam isu ekonomi (pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman) terhadap PMD dapat diantisipasi dengan perhitungan yang matang serta peningkatan ekonomi Indonesia melalui sektor kelautan.

2. Kemampuan Ekonomi dan Militer (*Hard Power*) Indonesia belum mampu untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok, maka diperlukan suatu bentuk kekuatan yang dapat mengimbangnya. Kekuatan yang dimaksud adalah *soft power*, sehingga Diplomasi Pertahanan sangat penting. Diplomasi pertahanan dapat digunakan sebagai instrumen kekuatan untuk menekan tantangan seperti *penggunaan hard power* (intimidasi) dalam relasi Indonesia dan Tiongkok. Selain itu, diplomasi pertahanan dapat membuka peluang kerjasama yang didasarkan pada rasa saling percaya dan saling

menguntungkan. Terkait dengan salah satu tantangan luar negeri yang dihadapi oleh Indonesia yakni, adanya persaingan atau kompetisi di antara Amerika Serikat dan Tiongkok, peneliti melihat bahwa wadah diplomasi pertahanan seperti ADMM Plus ataupun *joint patrol* dapat dipakai Indonesia untuk menghadirkan harmonisasi diantara kedua kekuatan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Creswell, John W. 2017. *Research Design (3rd Edition)*, USA, SAGE Publication 2017.
- Heywood, Andrew. 2000. *Key Concepts in Politics*, New York, Palgrave Mcmillan.
- Institute for Strategic Studies (London, England), & International Institute for Strategic Studies. (2018). *The military balance 2018*. London: Institute for Strategic Studies.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Nina, Silove. 2018. *Beyond the Buzzword: The Three Meanings of "Grand Strategy"*, *Security Studies Vol. 27*, USA: Routledge Taylor and Francis Group.

Jurnal

- Cai, Peter, *Understanding BRI*, (USA, Iowa Institute).
- Winger, Gregory. 2018. "The Velvet Theory: A Theory of Defense Diplomacy".

Perundang – undangan

- Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia, Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Website

- Anonim, "Perpres Satgas Kelautan Tak Boleh Tabrak Undang-Undang", dalam <https://sp.beritasatu.com/home/perpres-satgas-kelautan-tak-boleh-tabrak-undang-undang/104141>, diakses 20 Januari 2019.
- Anonim, Mamahit dan Xie Fang Teken MoU Penginderaan Satelit Laut, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/08/mamahit-dan-xie-fang-teken-mou-penginderaan-satelit-laut>, 8 Oktober 2014.
- Agastia, Dharma I.G.B. 2017. "3 Years Later, Where is Indonesia's Global Maritime Fulcrum", dalam <https://thedi diplomat.com/2017/11/3-years-later-where-is-indonesias-global-maritime-fulcrum/>, diakses pada 25 Januari 2019.
- <http://ikahan.com/2015/03/ikahan-malam-ceramah-ke-6-dr-marsetio-membahas-tentang-poros-maritim-dan-potensi-kerma/>, diakses pada 25 Januari 2019.
- Ikahan.com. 2015. "IKAHAN Malam Ceramah Ke-6, Dr. Marsetio Membahas Tentang Poros Maritim dan Potensi Kerma".

